

**ANALISIS PERAN AKTOR
DALAM PERUMUSAN PEMBANGUNAMONUMEN
AL-QUR'AN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

ZAKIROTUL KHASANAH

NIM. 4120040

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**ANALISIS PERAN AKTOR
DALAM PERUMUSAN PEMBANGUNAMONUMEN
AL-QUR'AN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

ZAKIROTUL KHASANAH

NIM. 4120040

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakirotul Khasanah

NIM : 4120040

Judul Skripsi : **Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan
Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya peneliti, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Zakirotul Khasanah

NOTA PEMIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Zakirotul Khasanah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya

kirirkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Zakirotul Khasanah**

NIM : **4120040**

Judul Skripsi : **Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan
Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Mei 2024

Pembimbing



Syamsuddin M.Si

NIP. 199002022019031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Zakirotul Khasanah**
NIM : **4120040**
Judul : **Analisis Peran Aktor dalam Perumusan
Pembangunan Monumen Al-Qur'an
Kabupaten Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Syamsuddin, M.Si**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. Zawawi, M.A.
NIP. 197706252008011013

Muh. Izza, M.S.I
NIP. 19790726201608D1006

Pekalongan, 3 Juni 2024
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTO

Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku Dan Apa Yang

Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku

Umar Bin Khattab

Ubahlah pola pikirmu dan kau akan mengubah duniamu

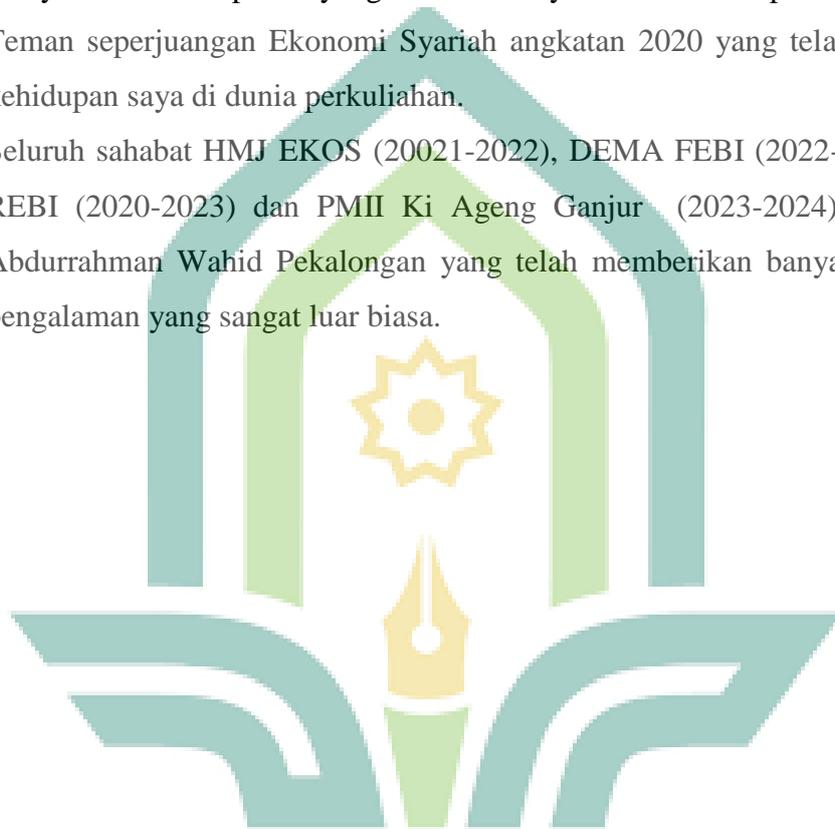


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap yang membacanya, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dalam penulisan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Cufrihardi dan Ibu Roliyah atas segala bentuk dukungan moral, material, doanya yang selalu mengiringi langkah putri bungsunya. Terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan dan kasih sayang tak terhingga serta selalu memberi inspirasi dan motivasi.
2. Kakak saya Mas Nursandi, Mba Wiwit Diayati, Mba Eli Pujiati, Mas Herman Setiawan, Mba Illa Bakti, Mas Rismanto yang senantiasa memberi dukungan dan senantiasa mendengarkan keluh kesah adek bungsunya.
3. Kakak ipar saya, Mba Leha, Mas Heruwanto, Mas Santoso, Teh Neha dan juga keponakan tersayang bulek, Kaka Reva, Abang Naufal, Mas Adit, Kaka Vania, Mas Rafif, dan aa' Zio yang senantiasa menghibur bulek iroh.
4. Dosen pembimbing, Bapak Syamsuddin M.Si.
5. Dosen Wali, Bapak Ali Amin Isfandiari M.Ag.
6. Almamater saya prodi Ekonomi Syariah, FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Almameter biru saya, PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Almameter oren saya, HMJ Ekonomi FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Diri saya sendiri yang telah berjuang dengan pantang menyerah untuk manajemen waktu menyeimbangkan diri antara kesibukan akademik dan organisasi.
10. Seluruh keluarga besar PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan selalu.
11. Seluruh sahabat saya yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah mewarnai kehidupan saya di dunia perkuliahan.
13. Seluruh sahabat HMJ EKOS (2021-2022), DEMA FEBI (2022-2023), PMII REBI (2020-2023) dan PMII Ki Ageng Ganjur (2023-2024) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.



ABSTRAK

ZAKIROTUL KHASANAH. Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan.

Kebijakan Publik merupakan kekuasaan pemerintah untuk menjalankan wewenangnya terhadap masyarakat umum. Kebijakan ini berjalan berdasarkan kepentingan umum guna mengatur kehidupan publik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui aktor, proses serta tujuan dari perumusan pembangunan monumen al-qur'an di kabupaten pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dimana data tersebut berasal dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka dan kedinasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diuji menggunakan teknik triangulasi data dan disusun menggunakan metode analisa data dengan tahapan reduksi data, display data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik mengenai pembangunan monumen al-qur'an adalah agenda yang berada pada tahapan program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Kebijakan ini dirumuskan oleh duabelas aktor yang berasal dari unsur pemerintahan tanpa melibatkan pihak lain. Hingga tahun 2024, proses perumusan kebijakan ini hanya melalui empat tahapan. Sedangkan tujuan pembangunan ini adalah untuk membuat Icon kabupaten sehingga membentuk daya tarik wilayah yang kemudian berdampak pada sektor perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Aktor, Proses Perumusan, Tujuan kebijakan

ABSTRACT

ZAKIROTUL KHASANAH. Analysis of the Role of Actors in Formulating the Development of the Al-Qur'an Monument in Pekalongan Regency.

Public Policy is the government's power to exercise its authority over the general public. This policy operates based on public interests to regulate public life. This research aims to determine the actors, processes and objectives of formulating the construction of the Al-Qur'an monument in Pekalongan district.

This research is a type of field study research that uses a descriptive qualitative approach. The data used comes from primary data where the data comes from governmental and non-governmental elements and secondary data comes from literature and official studies. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation, then the data was tested using data triangulation techniques and compiled using data analysis methods with stages of data reduction, data display and ending with a conclusion.

The research results show that public policy regarding the construction of Al-Qur'an monuments is an agenda that is at the stage of the Pekalongan Regency square area planning program stage. This policy was formulated by twelve actors from government elements without involving other parties. Until 2024, the policy formulation process will only go through four stages. Meanwhile, the aim of this development is to create a district icon so as to create a regional attraction which then has an impact on the community's economic sector.

Keywords: Public Policy, Actors, Formulation Process, Policy Objectives



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati., SH., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Tamamudin., M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Syafi'i., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Happy Sista Devy., M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Syamsuddin, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ali Amin Isfandiar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.

8. Seluruh Narasumber baik dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 2021-2026 dan Pelaku UMKM yang telah menerima kedatangan saya dengan baik sehingga saya dapat memperoleh data yang saya perlukan.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Cufrihardi dan Ibu Roliyah yang telah mengajarkan arti kehidupan. Terimakasih Ibu untuk semua doa dan dukungannya dan terimakasih ayah, gelar ini bungsu berikan untuk engkau, semoga ayah bangga melihat bungsu.
10. Kakak saya Mas Nursandi, Mba Eli Pujiati, Mba Wiwit Diayati, Mas Herman Setiawan, Mba Illa Bekti, Mas Rismanto dan Kakak ipar saya, Mba Leha, Mas Heruwanto, Mas Santoso, Teh Neha serta keponakan tersayang bulek, Kaka Reva, Abang Naufal, Mas Adit, Kaka Vania, Mas Rafif, dan aa' Zio yang senantiasa memberikan dukungan dan senantiasa menghibur.
11. Teruntuk keluarga besar PMII REBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama tokoh-tokoh yang telah memberikan banyak ilmunya, M.Fani Saifullah S.Akun, Syah Rizal Alfinudin, S.E, Sokhibul Mutaqin, S.E, Musfiroh Indah Sari, S.E, Khoirunnisa Azmi Inayati, S.E yang telah menyambut dengan baik kedatangan saya di rumah biru kuning.
12. Sahabat saya Sri Marliana, Siti Nur Kholifah, Jihan Mifta Sabilah, Nur Kholidah, Nurul Eka Setiani, Al Hayu Lestari, Sri Wulan Adiningsih, Fara Lustiani, Ahmad Sholehudin, M. Bagus Aminudin, Khoirul Huda, Indra Pratama, Zakiyah Mubarak, dan M. Shofi Anshori yang telah memberikan warna pelangi di masa perkuliahan saya.

13. Sahabat Kaderisasi Intra maupun Ekstra, Bella Dwi Saputri, Putri Wulan sari, Mariyatul Khusniah, Maulida Riskiyani, Fina Qoif Fiana, Irma Suryani, dan Dewi Arina yang selalu bersedia mengimbangi aktivitas saya selama diorganisasi, kalian adik-adik terhebat yang pernah saya kenal.
14. Keluarga besar Bidang Ekonomi dan Infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan yang selalu menjadi keluarga kedua selama proses penyusunan skripsi berlangsung.
15. Teman-teman Ekonomi Syariaiah Angkatan 2020, Kelas A terimakasih atas kebersamanya dalam masa perkuliahan.
16. Sahabat PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur Pekalongan angkatan 20 yang senantiasa mengganggu proses penyusunan skripsi saya. Terimakasih saya ucapkan karena kalian adalah pacuan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

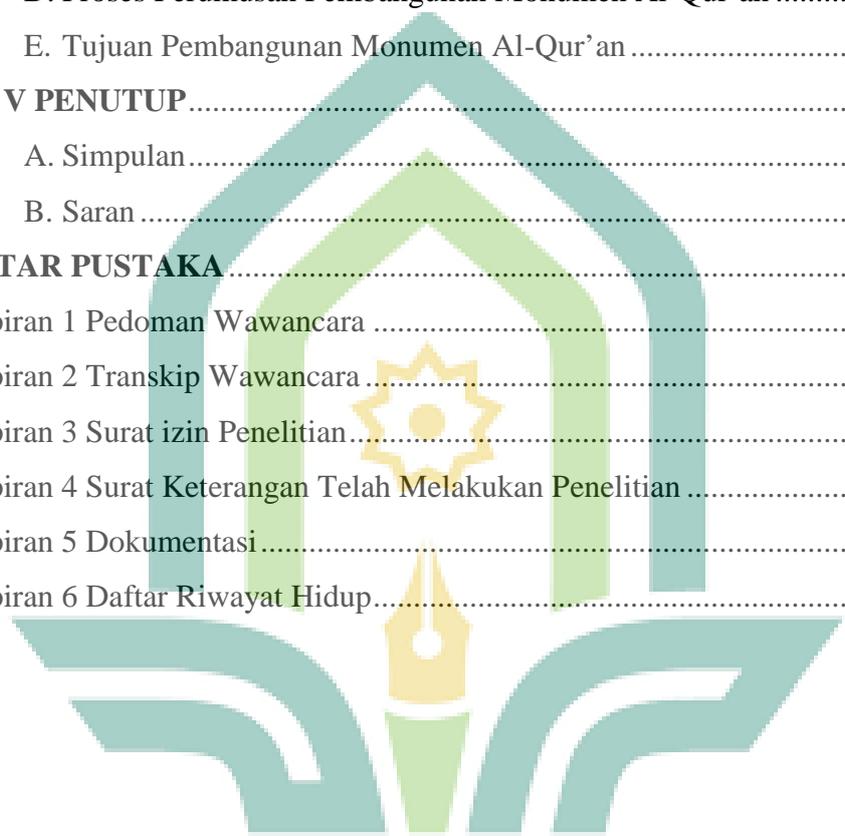
Pekalongan, 7 Mei 2022

Zakirotul Khasanah
NIM. 4120040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI	ii
NOTA PEMIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
B. Telaah Pustaka	18
C. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Setting Penelitian	26
D. Subjek Penelitian dan Sampel	26
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27

G. Teknis Keabsahan Data	28
H. Metode Analisis Data	28
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
B. Data Lapangan	35
C. Aktor Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an.....	39
D. Proses Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an	46
E. Tujuan Pembangunan Monumen Al-Qur'an	50
BAB V PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	IV
Lampiran 3 Surat izin Penelitian.....	XVIII
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XIX
Lampiran 5 Dokumentasi	XX
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	XXIX



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُ = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *f imah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-bad</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Proses tahapan penyusunan kebijakan public



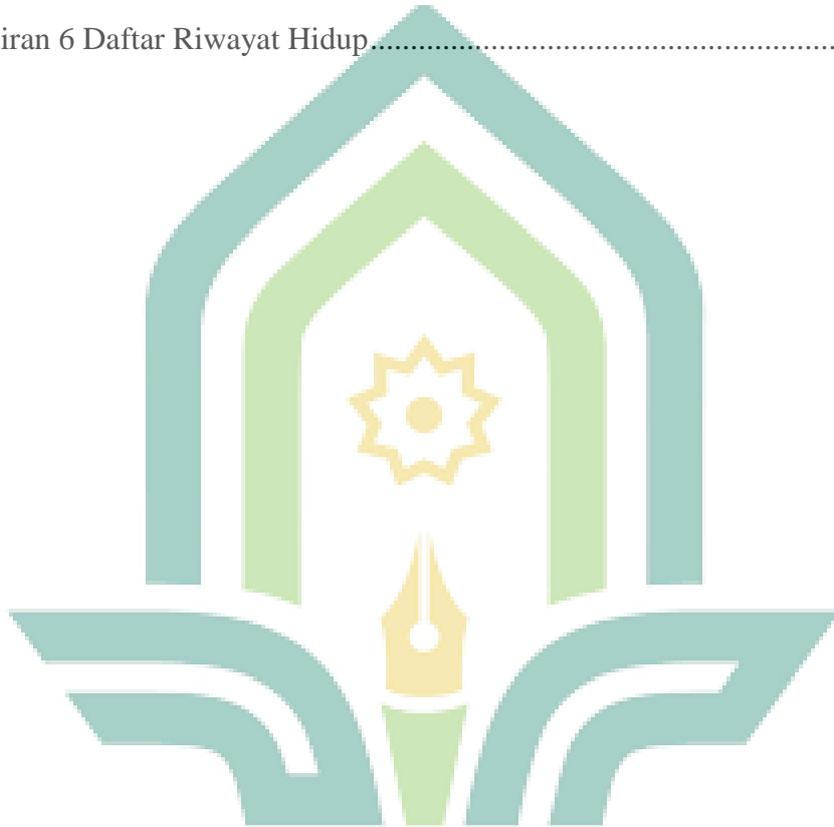
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	23
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	IV
Lampiran 3 Surat izin Penelitian.....	XVIII
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XIX
Lampiran 5 Dokumentasi.....	XX
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	XXIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hak otonomi daerah yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 untuk diberikan kepada para pemimpin daerah guna mengatur keperluan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan atas usaha dalam mengatur wilayah ini harus dilaksanakan dengan tetap mengakui nilai supremasi dan kedaulatan negara (Sagala, 2016). Peraturan ini dibuat atas dasar pemberian kebebasan kepada seluruh wilayah untuk menangani daerahnya sesuai dengan peluang dan permasalahan masing-masing karena pada dasarnya setiap wilayah tentunya memiliki situasi dan kondisi publik yang berbeda-beda. Maka disinilah kedudukan pemerintah sangat dinilai penting untuk mengambil kebijakan atas permasalahan mana yang sekiranya harus diselesaikan. Pengambilan keputusan pada tahap penentuan agenda ini biasa terjadi dalam siklus politik yang biasa disebut dengan tahap *agenda setting* yang biasanya penentuannya disesuaikan dengan urgensi yang ada.

Urgensi proses penetapan agenda terletak pada sentralitas penentuan agenda itu sendiri. Bahwa nyatanya dalam pengambilan keputusan atas penetapan agenda ini tidak akan berlangsung tanpa peran dari para aktor politik yang mampu memperhatikan berbagai isu yang diangkat dalam kebijakan publik dan terlebih dahulu memahami proses penetapan agenda yang harus ditempuh dalam pengambilan kebijakan publik. Sehingga dalam hal ini “Wajah kedua

kekuasaan” akan terlihat terhadap kemana perhatian aktor politik itu diarahkan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengambilan kebijakan dan menjadikannya lebih efektif, diperlukan pola komunikasi yang bersifat saling membantu yang diimbangi dengan sikap kerja sama tanpa mementingkan golongan tertentu (Mahmud, 2020). Proses penetapan agenda dari kompleksnya permasalahan tidak terlepas dari proses politik. Berbagai permasalahan tersebut nantinya akan dikaji dan salah satu dari permasalahan yang ada akan ditetapkan untuk sebagai agenda oleh para aktor yang terlibat pada proses formulasi kebijakan. Seluruh aktor yang ada akan berupaya untuk membahas topik yang dinilai *urgent* guna menarik perhatian masyarakat sehingga berdampak ke tahap pengambilan keputusan. Tahap inipun biasanya tidak terlepas dari adanya pengaruh dari aktor-aktor pemilik kekuasaan.

Secara umum, suatu isu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam agenda politik. Sebab jika ada orang atau kelompok tertentu yang ingin memasukkan isu tersebut, maka semua pihak yang menyusun agenda politik tersebut harus bisa mengidentifikasi masalah yang dimaksud. Sekiranya apakah permasalahan yang dibahas adalah masalah utama atau hanya masalah kecil dari sebagian besar masalah lain. Aktor yang mampu menjelaskan permasalahan secara rinci pasti akan mempunyai keuntungan dalam perdebatan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena keputusan agenda akan diambil ketika masalah yang dikaji dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak yang ada. Hal ini menunjukkan fakta bahwa pada tahap penentuan agenda politik pasti akan terdapat aktor yang

mendominasi serta mempunyai kekuasaan yang lebih daripada aktor yang lain (Fauzi & Rostyaningsih, 2018).

Pada tahap formulasi kebijakan publik, khususnya di tahap penentuan agenda, sikap aktor adalah kunci utama untuk mempengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan oleh aktor yang terlibat. Maka dengan ini, kajian tentang keterlibatan aktor pada proses formulasi kebijakan publik dinilai penting karena proses ini saling berhubungan dengan adanya orientasi dan keinginan dari pihak-pihak yang berperan pada tahap formulasi kebijakan publik selaku yang pihak yang memiliki kepentingan (Howlett et al., 1995).

Peran aktor pada formulasi kebijakan publik sangat penting untuk diteliti terlebih untuk wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2021, Fadia Arafiq, S.E., M.M resmi dinyatakan sebagai Bupati Kabupaten Pekalongan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Melalui kepemimpinannya, Pemkab Pekalongan memutuskan sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan adalah program unggulan periode ini (Kutnadi, 2021). Pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program penyaluran bantuan seragam gratis bagi murid SD dan SMP Negeri yang terdaftar sebagai siswa kurang mampu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan program “Kudu Sekolah” dan dengan program ini Pemkab Pekalongan telah berhasil mengembalikan 668 ATS ke sekolah (Toni, 2022).

Sedangkan untuk program unggulan dibidang kesehatan adalah Program berobat gratis. Program ini disiasati guna menolong warga kabupaten yang masih keberatan dalam melakukan pembayaran saat berobat. Melalui program

ini, mereka hanya cukup menunjukkan KTP untuk tahap administrasinya dan akan langsung mendapatkan penanganan. Selain dua bidang diatas, Pemkab juga memiliki program unggulan pada bidang Infrastruktur. Diantaranya adalah pengalih statusan jalan poros desa menjadi milik Pemkab Pekalongan dengan total sebanyak 292 titik jalan. Hal ini dimaksudkan agar Pemkab bisa mempercepat perbaikan jalan menggunakan dana APBD (Khaeruddin, 2023). Selain itu, Pemkab Pekalongan pada era Fadia Arafiq juga tetap konsisten untuk melanjutkan dan menyelesaikan program revitalisasi pasar diantaranya adalah pasar Kajen, pasar Kedungwuni, dan pasar Wiradesa. Kini ketiga bangunan tersebut termasuk Pasar Wiradesa telah diresmikan dan sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya (Karya, 2023).

Kajian terhadap peran aktor dalam pembangunan Monumen Al-Qur'an di Alun-Alun Kajen dipandang perlu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Meski keberadaan Taman alun-alun Kajen dibutuhkan masyarakat untuk sarana rekreasi, namun ini bukanlah kebutuhan primer. Pembangunannya pun tidak menyelesaikan masalah lain yang lebih mendasar seperti permasalahan kumuh, gizi buruk, dan pengangguran. Bukankah keberhasilan kebijakan dinilai dari segi kebermanfaatannya, demikian juga dengan keberadaan Monumen Al-Qur'an di Alun-Alun Kajen apakah dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh warga kabupaten pekalongan?, 2) Tidak konsistennya pemerintah kabupaten pekalongan dalam menjalankan program pemerataan pembangunan dalam lingkup tata ruang. 3) adanya berbagai masalah lain yang belum diselesaikan oleh Pemkab Pekalongan seperti penanganan permukiman kumuh di Kecamatan

Wonokerto serta kegagalan penanganan air limbah akibat industri batik di kecamatan Buaran yang menyebabkan adanya pencemaran air di lingkungan kabupaten pekalongan.

Penting untuk diketahui bersama bahwa citra suatu daerah ditentukan oleh bagaimana daerah tersebut dibentuk oleh para pemimpinnya. Hal ini dapat dilihat melalui kemana arah pemerintah dari semua keputusan dan tindakan yang diambilnya (Paramita et al., 2017). Selain itu, nilai-nilai aktor yang terlibat pada formulasi kebijakan juga berpengaruh terhadap topik mana yang dikedepankan. Jika dilihat dari yang ada, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui kebijakan yang dikembangkannya memilih memperbaiki penataan ruang di sekitar Alun-Alun Kajen untuk menciptakan pusat keramaian. Hal ini didasari karena meskipun kecamatan kajen dikenal sebagai pusat pemerintahan kabupaten pekalongan namun tingkat mobilitasnya masih terkalahkan oleh keramaian yang ada di kecamatan kedungwuni, buaran dan wiradesa.

Pembangunan Monumen ini tentunya sangat erat kaitannya dengan peran dan nilai-nilai pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mempunyai visi mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan ini dianggap mampu meningkatkan mobilitas daerah kajen serta mampu dimanfaatkan oleh para UMKM sekaligus cara untuk menertibkan keberadaan PKL khususnya pedagang di sekitar Kecamatan Kajen karena dengan adanya Icon Monumen Al-Qur'an yang dapat menarik wisatawan (Agus, 2022).

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan mempunyai peranan yang penting pada proses penetapan agenda dan memutuskan permasalahan mana yang nantinya akan diagendakan. Meskipun tentu akan ada proses negosiasi secara alamiah yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan, namun keputusan akhir tetap ada di tangan pengambil kebijakan. Pembangunan Monumen ini tentu merujuk pada visi Kabupaten Pekalongan yang tertera di RPJMD periode 2021-2026 bahwasanya Pemkab menginginkan adanya pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Pekalongan (RPJMD Kabupaten Pekalongan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah kabupaten adalah menyusun atau menata tata ruang seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sekitar. Hal ini sebenarnya cukup dilematis karena Kabupaten Pekalongan masih memiliki banyak persoalan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah kabupaten. Tetapi dari berbagai pemberitaan media yang ada menunjukkan bahwa perhatian Pemkab Pekalongan terfokus pada pembangunan ruang publik seperti revitalisasi pasar, Pengadaan IPAL, dan pembangunan tanggul namun secara media pembangunan Monumen Al-Qur'an di taman Alun-Alun Kajeen lebih mendapatkan sorotan.

Kajian yang dilakukan Yulieth-Rafael menunjukkan fakta bahwa penetapan agenda untuk tetap melanjutkan revitalisasi pasar kajeen telah menyebabkan hadirnya masalah baru diantaranya adalah ketidak efektifan aktivitas jual beli di pasar kajeen karena proses pembangunannya yang lebih lambat satu tahun dari sebelumnya (Yulieth-Rafael, 2020). Selain itu terdapat pula kajian penelitian

mengenai pelaksanaan atas peraturan pengelolaan air limbah pada industri batik di Samorejo Pekalongan menunjukkan fakta bahwasanya masih terdapat berbagai permasalahan atas penerapan kebijakan yang ada. Diantaranya adalah pembinaan dan pengawasan oleh Perkim Kabupaten dan Dinas LH yang dinilai kurang. Pihak terkait tidak mampu memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran kebijakan yang ada, dan adanya ketidak konsistennya komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan industri batik (Haniza et al., 2022). Sedangkan pada penelitian mengenai Perencanaan tata ruang di Kecamatan Buaran yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutanpun juga menghadapi tantangan. Bahwasanya dalam pembangunan infrastruktur di Simbang Kulon berjalan paralel dengan industri batik sehingga menciptakan kondisi perumahan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh industri batik yang berdampak terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan melalui terbentuknya kawasan kumuh (Zakaria et al., 2023).

Meski media berita yang ada mengabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil mendapatkan penghargaan atas keberhasilan program pembangunan daerah di Musrebang Jawa Tengah pada tahun 2023 (Prokompin, 2022). Namun, dibalik kesuksesannya, masih ada sejumlah masalah yang luput dari perhatian. Selain itu masih cacatnya program pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang telah dijelaskan diatas serta sebenarnya masih ada permasalahan lain yang harusnya segera diselesaikan oleh Pemkab dimana diantaranya adalah masalah pada bidang kesehatan.

Menurut fakta informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2022 terdapat 996 kasus stunting dan 51 kasus gizi buruk pada tahun 2022 dibandingkan tahun lalu yang hanya 36 kasus (Pekalongan, 2022). Selain itu, terdapat pula permasalahan lain seperti munculnya permukiman kumuh di beberapa wilayah Pekalongan. Berdasarkan data, luas permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan mencapai 344,21 hektare. Sebagian besar permukiman kumuh sebesar ini terletak di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Diantaranya adalah wonokerto, tirta dan Siwalan. (Ahmad, 2023). Terbentuknya permukiman kumuh ini disebabkan karena rumah-rumah mereka terendam sehingga masyarakat terpaksa membangun rumah di sepanjang aliran sungai. Hal ini menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan berdampak pada ketidaksesuaian struktur tata ruang permukiman di Kabupaten Pekalongan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan visi pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menginginkan penataan ruang dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Pekalongan.

Seluruh persoalan diatas seolah teralihkan oleh agenda pembangunan Monumen al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa aktor-aktor berpengaruh telah memainkan peranannya dalam proses penetapan agenda, sehingga meskipun jelas masih ada permasalahan yang harus diselesaikan di bidang lain, pembangunan terus berlanjut. Selain perannya yang besar dan dominan, kita juga bisa melihat bahwa arah pemerintah Kabupaten Pekalongan yang lebih memperhatikan permasalahan pembangunan infrastruktur fisik daripada yang lainnya.

Lalu apa sebenarnya tujuan dibangunnya Monumen ini? Meski keberadaannya tidak bisa langsung dilihat atau dimanfaatkan warga dan bukan merupakan kebutuhan primer, namun pemerintah tetap melanjutkan proses pembangunannya. Kritik terhadap proses pembangunan Monumen diminimalkan, bahkan masyarakat pun tampaknya tidak terlalu sadar akan upaya pemerintah. Hal ini menarik untuk diteliti mengenai posisi dukungan masyarakat terhadap pembangunan Monumen, bagaimana proses perumusan kebijakannya serta sebenarnya siapa aktor yang terlibat pada tahap *agenda setting* sehingga pembangunan Monumen Al-Qur'an terus ada dan akhirnya mampu menciptakan pemahaman yang positif bagi warga kabupaten pekalongan dan melupakan permasalahan disektor lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor yang terlibat pada proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui peran aktor yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan
- b. Mengetahui proses perumusan pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan
- c. Mengetahui tujuan dari pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan

2. Manfaat

Berikut beberapa manfaat dari adanya penelitian ini :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sekaligus dapat menjadi bahan acuan untuk peneliti berikutnya serta bisa menjadi bahan perbandingan proses perumusan kebijakan publik pada suatu daerah.

b. Manfaat praktis

i. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan terhadap disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya terutama pada mata kuliah ekonomi pembangunan.

ii. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk mahasiswa/mahasiswi khususnya bagi mereka yang berkonsentrasi

ekonomi pembangunan karena memberikan informasi mengenai proses perumusan kebijakan publik sekaligus keterlibatan aktor dalam prosesnya.

iii. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat untuk masyarakat umum khususnya generasi muda karena memberikan informasi mengenai proses perumusan kebijakan publik sekaligus keterlibatan aktor dalam proses perumusannya sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk berperan aktif dalam membangun sebuah wilayah.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan gambaran tentang pengertian kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik, dan teori yang digunakan pada tahap perumusan kebijakan publik. Selain itu, terdapat pula tinjauan pustaka oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan bagi

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai proses penelitian yang dilakukan. Bab ini membahas berbagai topik seperti jenis, pendekatan, setting, subjek, sampel dari penelitian yang dilakukan serta terdapat pula gambaran

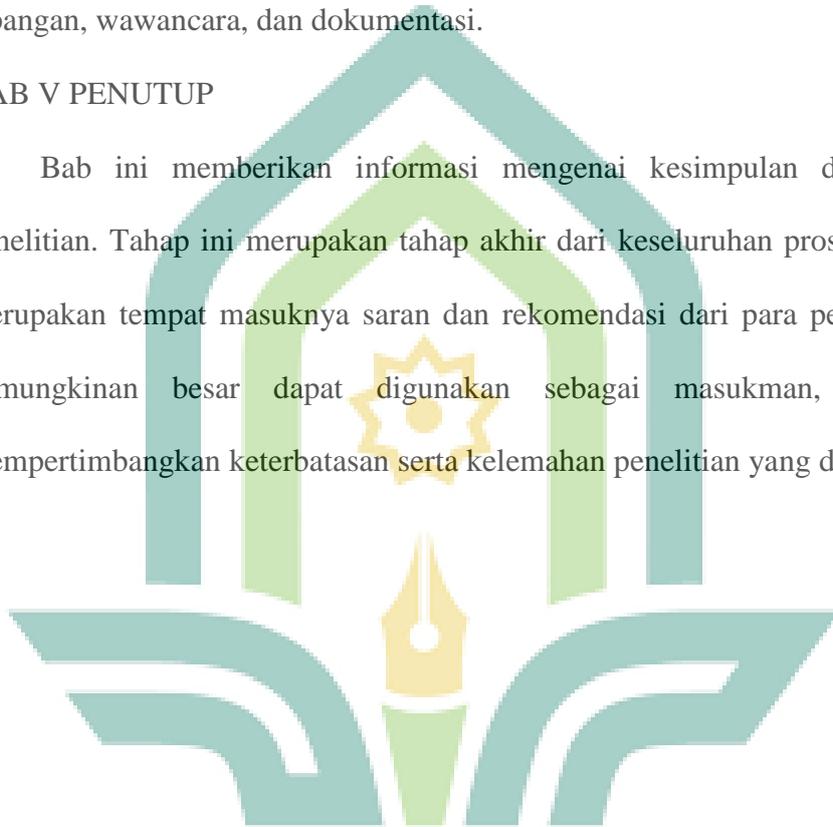
mengenai kejelasan dari sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan metode analisis data

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Seluruh pembahasan dirinci dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan informasi mengenai kesimpulan dari temuan penelitian. Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses dan juga merupakan tempat masuknya saran dan rekomendasi dari para peneliti, yang kemungkinan besar dapat digunakan sebagai masukan, dan juga mempertimbangkan keterbatasan serta kelemahan penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Aktor yang terlibat dalam proses perumusan pembangunan monumen al-qur'an berjumlah 12 aktor. Seluruh aktor ini berasal dari sebelas lembaga eksekutif (Bupati, Sekretariat Daerah kabupaten Pekalongan, Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan, DPU TARU, Dinas LH, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementerian Agama), satu lembaga legislatif (DPRD Kabupaten Pekalongan) tanpa adanya unsur aktor lain.
2. Pembangunan monumen al-qur'an adalah sebagian dari agenda publik yang berada pada program penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan. Agenda ini lahir dengan menggunakan empat tahapan penyusunan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan dengan menyisakan satu tahapan yaitu tahap penilaian kebijakan. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2024 pembangunan penataan kawasan alun-alun kabupaten pekalongan masih terus berjalan dan ada 2 tahapan pembangunan yang belum diselesaikan.
3. Pembangunan monumen al-quran memiliki dua tujuan yaitu untuk menciptakan Icon Kabupaten Pekalongan sebagai daya tarik dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Selama pasca peresmian penataan kawasan alun-alun pada tahun 2023, kini kedua tujuan tersebut

sudah bisa untuk dikatakan tercapai. Peningkatan jumlah pengunjung, jumlah pedagang kaki lima, tingkat mobilitas terus bertambah dari hari ke hari sehingga hal ini cukup menjadi bukti bahwa tujuan pemkab dalam pengadaan agenda ini telah terwujud.

4. Pembangunan ini telah sesuai dengan unsur pembangunan syariah yaitu pembangunan dengan bersifat berkelanjutan yang berdampak kepada terbukanya peluang dalam mencari rizqi yang halal sesuai dengan QS. Al Jumuah 10.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mencari dan mengkaji lebih banyak data dari seluruh narasumber yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan agar hasil penelitiannya lebih dalam dan lebih baik lagi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup masyarakat umum, organisasi kepemudaan, ataupun organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan data yang lengkap agar hasil penelitiannya lebih sempurna.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan melebarkan pencarian data ke lingkup perguruan tinggi disekitar lokasi untuk melihat keterlibatan unsur akademisi dalam penyusunan kebijakan agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- RPJMD Kabupaten Pekalongan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026*.
- Sagala, A. (2016). Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama Orde Baru dan Reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–15.
- Salaputa, I., Madani, M., & Prianto, A. L. (2013). Peran Aktor Dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tengah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 35–47. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.56>
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.
- Sumarrosul. (2024). *Hasil Wawancara dengan Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan*.
- Toni. (2022). *Pemkab Pekalongan Ciptakan Program Unggulan Berkomitmen Wujudkan Masyarakat yang Setara*. 17 Desember. <https://www.sorotnews.co.id/2022/12/17/pemkab-pekalongan-ciptakan-program-unggulan-berkomitmen-wujudkan-masyarakat-yang-setara/>
- Wibowo, U. B. (2013). Intensitas Peran Aktor Kebijakan dan Kekuatan Politis dalam Perumusan Kebijakan Sertifikasi Pendidik. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6(1), 11–20.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. (No Title).
- Winengan. (2016). Kuasa Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Aras Lokal (Studi Pada Kebijakan Pembebasan Lahan Kawasan Mandalika Resort di Lombok) Winengan Universitas Islam Negeri Mataram. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 367–387.
- Yulieth-Rafael, 2020. (2020). Studi Kebijakan Publik : Revitalisasi Pasar Kajian Kabupaten Pekalongan. *Angewandte Chemie International Edition* Yulieth-Rafael, 2020. (2020). *Studi Kebijakan Publik : Revitalisasi Pasar Kajian Kabupaten Pekalongan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 95.
- Zakaria, A. V., Anwar, S. A. ., & Anwar, B. T. H. (2023). Analisis Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan). 3(6), 627–635.

- Agus, A. (2022). *Alun-Alun Kajian Bakal Dilengkapi Ikon Alquran dan Air Mancur Warna-Warni*.
<https://radarsemarang.jawapos.com/kajian/721399621/alunalun-kajian-bakal-dilengkapi-ikon-alquran-dan-air-mancur-warnawarni>
- Ahmad, N. R. (2023). *Permukiman Kumuh di Kabupaten Pekalongan Masih 344,21 Ha, Penanganan Dinilai Lambat*.
<https://radarsemarang.jawapos.com/kajian/721720775/permukiman-kumuh-di-kabupaten-pekalongan-masih-34421-ha-penanangan-dinilai-lambat>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anjarwati, F. I. (2013). Analisis Peran Aktor Dalam Proses Agenda Setting Perumusan Kebijakan Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Arum. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL di sekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Asidiq, M. H. (2024). *Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan*.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Dunn, W N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, WilliM N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gajah Mada Universitas Press* (pp. 1–710). <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani. <https://books.google.co.id/books?id=PRFfhYdzyawC>
- Hamidi, M. L. (2003). *Jejak-jejak ekonomi syariah*. Senayan Abadi Pub.
- Haniza, T. Z., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Batik di Desa Samborejo, Kabupaten Pekalongan. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(3), 1–20.
- Haryanto, W. (2024). *Hasil wawancara dengan kepala bidang ekonomi dan*

infrastruktur BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan.

- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (1995). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford university press Toronto.
- Husnul Yakin, Susi Sulandari, D. L. J. (2013). *Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang.*
- Karya, D. J. C. (2023). *Sosialisasi Penataan Pedagang Dan Peninjauan Pasar Wiradesa.* <https://ciptakarya.pu.go.id/berita-detail?12904&satker=505843>
- Khaeruddin, N. (2023). *292 Jalan Poros Desa Diambil Alih Pemkab. Bupati Pekalongan : Supaya Bisa Segera Diperbaiki.* 11 Oktober. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/0610464472/292-jalan-poros-desa-diambil-alih-pemkab-bupati-pekalongan-supaya-bisa-segera-diperbaiki>
- Kuncoro, W. (2024). *Hasil wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan.*
- Kutnadi. (2021). *3 program unggulan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.* 29 Juni. <https://jateng.antaraneews.com/berita/389586/ini-dia-3-program-unggulan-bupati-pekalongan-fadia-arafi>
- Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2020). Peran Civil Society Organization (Cso) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 59. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62>
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.* PT Remaja Rosdakarya. <https://books.google.co.id/books?id=ohGfAQAACAAJ>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nahariah, N., & Nursaifullah, N. (2021). Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i2.199>
- Paramita, C. C. G., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2017). *Peran Aktor Lokal Dalam Formulasi Kebijakan Ex Officio Di Kota Batam.*

- Pekalongan, R. (2022). *2022 Jumlah Kasus Gizi Buruk Meningkat*. 26-07. <https://radarpekalongan.disway.id/read/9012/2022-jumlah-kasus-gizi-buruk-meningkat>
- Prokompin. (2022). *Kabupaten Pekalongan Raih Penghargaan Pembangunan Daerah*. 14 April. 27 November 2023
- Purnomo, I. D. (2023). *Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Proyek Rehabilitasi Alun-alun Kajen Artikel ini telah tayang di Tribun-Pantura.com dengan judul Komisi III DPRD Kabupaten Pekalongan Pertanyakan Proyek Rehabilitasi Alun-alun Kajen*, <https://pantura.tribunnews.com/2023/01/06/komisi-iii-dprd-kabupaten-pekalongan-pertanyakan-proyek-rehabilitasi-alun-alun-kajen?page=all>
- Rini. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL disekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Rini, & Arum. (2024). *Hasil wawancara dengan PKL disekitar alun-alun kabupaten pekalongan*.
- Roshanti, D., Laili, R. N., Munif, B., & Habibitasari, B. B. (2022). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Pogram Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 56–70. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.129>



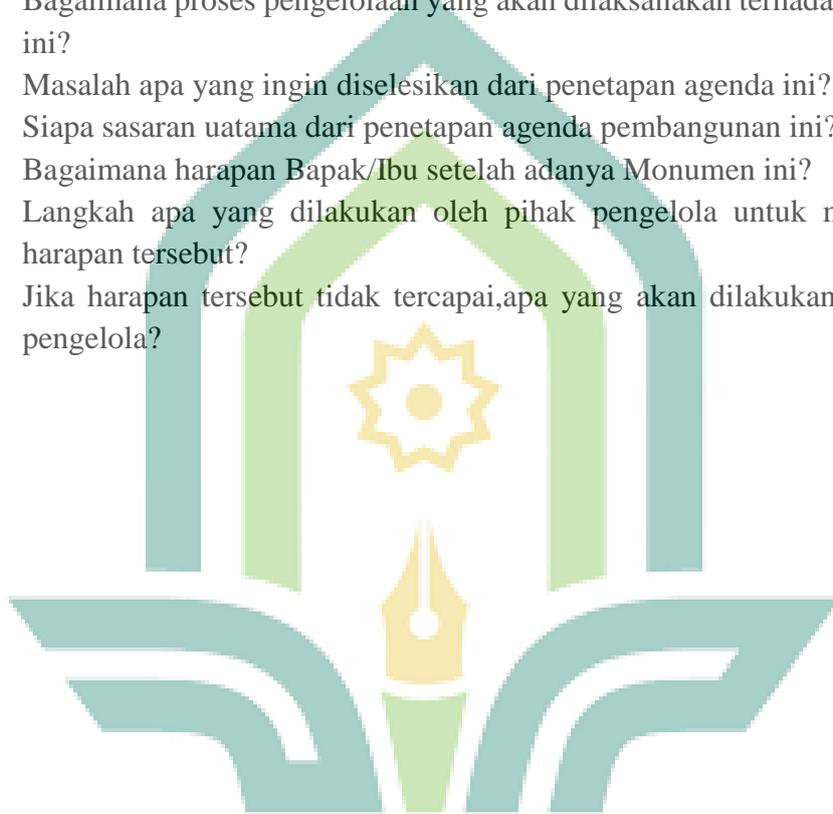
Daftar Pertanyaan Wawancara
Tentang Gambaran Proses Perumusan Kebijakan
Terhadap Aktor Kepemerintahan

1. Kapan kebijakan pembangunan Monumen ini mulai didiskusikan?
2. Bagaimana peran instansi Bapak/Ibu dalam penetapan agenda pembangunan ini?
3. Kapan pertama kali instansi Bapak/Ibu mendapat undangan rapat dari diskusi agenda ini?
4. Berapa lama proses diskusi penetapan agenda ini berlangsung?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai alur diskusi dan alur penetapan agenda yang telah berlangsung dari kebijakan publik ini?
6. Hal apa yang sempat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembangunan Monumen al-qur'an?
7. Hal apa yang menjadi alasan sehingga agenda ini disepakati oleh pihak instansi Bapak/Ibu?
8. Bagaimana alur jalan dari proses diskusi dalam penetapan agenda ini?



Daftar Pertanyaan Wawancara
Tentang Tujuan Perumusan Kebijakan
Terhadap Aktor Kepemerintahan

1. Apa tujuan jangka pendek dari pembangunan Monumen al-qur'an ini?
2. Apa tujuan jangka panjang dari pembangunan Monumen al-qur'an ini?
3. Bagaimana proses pengelolaan yang akan dilaksanakan terhadap Monumen ini?
4. Masalah apa yang ingin diselesaikan dari penetapan agenda ini?
5. Siapa sasaran utama dari penetapan agenda pembangunan ini?
6. Bagaimana harapan Bapak/Ibu setelah adanya Monumen ini?
7. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mewujudkan harapan tersebut?
8. Jika harapan tersebut tidak tercapai, apa yang akan dilakukan oleh pihak pengelola?



Daftar Pertanyaan Wawancara

Terhadap Aktor Non – Pemerintahan

1. Apakah pihak masyarakat pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekalongan dalam penetapan agenda publik?
2. Apakah saudara/i pernah dilibatkan oleh Pemkab Pekalongan dalam penetapan agenda publik?
3. Apakah saudara/i memahami alur perumusan kebijakan publik?
4. Apakah saudara/i tahu bahwa masyarakat adalah salah satu elemen yang harus ada dalam perumusan kebijakan publik?
5. Apa manfaat dari keberadaan pembangunan ini?
6. Apa dampak dari keberadaan Monumen al-quran ini?
7. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap pembangunan Monumen al-qur'an di alun-alun kaje ini?



Transkrip Wawancara

Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide pembangunan ini berasal dari Ibu Bupati Pekalongan periode 2020-2026.
2. Saat menyetujui gagasan tersebut karena sudah saatnya alun-alun pekalongan memang harus dipercantik.
3. Perangkat Daerah yang terlibat pada saat perumusan pembangunan ini diantaranya, Bupati, DPU TARU, Dinas LH, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Perhubungan, DPRD, MUI Kabupaten Pekalongan, dan saya selaku unsur dari sekretariat daerah.
4. Seluruh perangkat daerah yang ada menyetujui ide dari Ibu Bupati.
5. Tidak ada pihak yang menolak gagasan Ibu.
6. Rapat perumusan dipimpin langsung oleh Ibu dan beliau pula yang menjelaskan secara detail tentang keinginannya yang kemudian didiskusikan bersama Perangkat Daerah yang hadir.
7. Saat perumusan kebijakan, rapat hanya dilakukan bersama para Perangkat Daerah seperti yang tadi saya sebutkan.
8. Perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan agenda ini adalah Dinas DPU TARU.



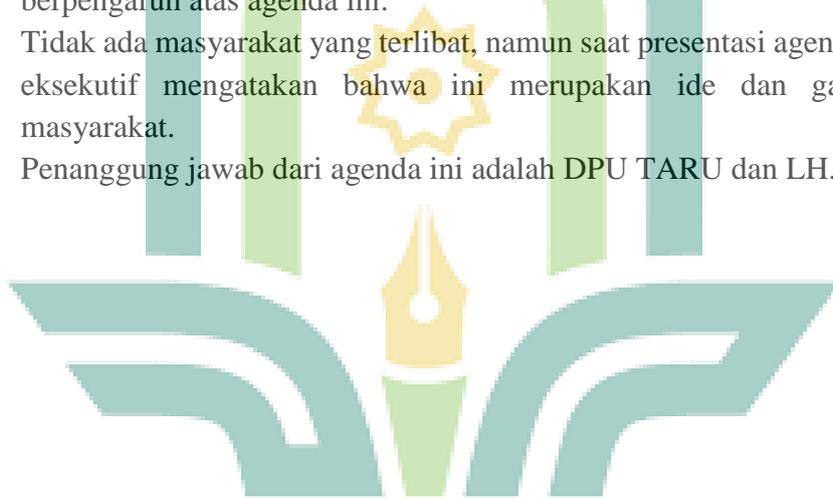
Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide agenda ini dari Ibu Bupati Fadia Arafiq.
2. Saya setuju dengan ide tersebut, karena itu ide yang bagus dan sesuai dengan permasalahan di kabupaten pekalongan.
3. Banyak pihak yang terlibat seperti dinas perhubungan, MUI dan sebagainya, namun yang jelas agenda ini ditanggung jawabi oleh DPU TARU.
4. Seluruh yang hadir saat rapat menyetujui ide tersebut.
5. Tidak ada pihak manapun yang kontra dengan ide yang ada.
6. Saat rapat penyusunan agenda dipimpin langsung oleh Ibu Bupati dan beliau yang menjelaskan langsung mengenai ide tersebut.
7. Yang merumuskan hanya para perangkat daerah yang mendapatkan undangan rapat.
8. Instansi yang bertanggungjawab adalah DPU TARU.



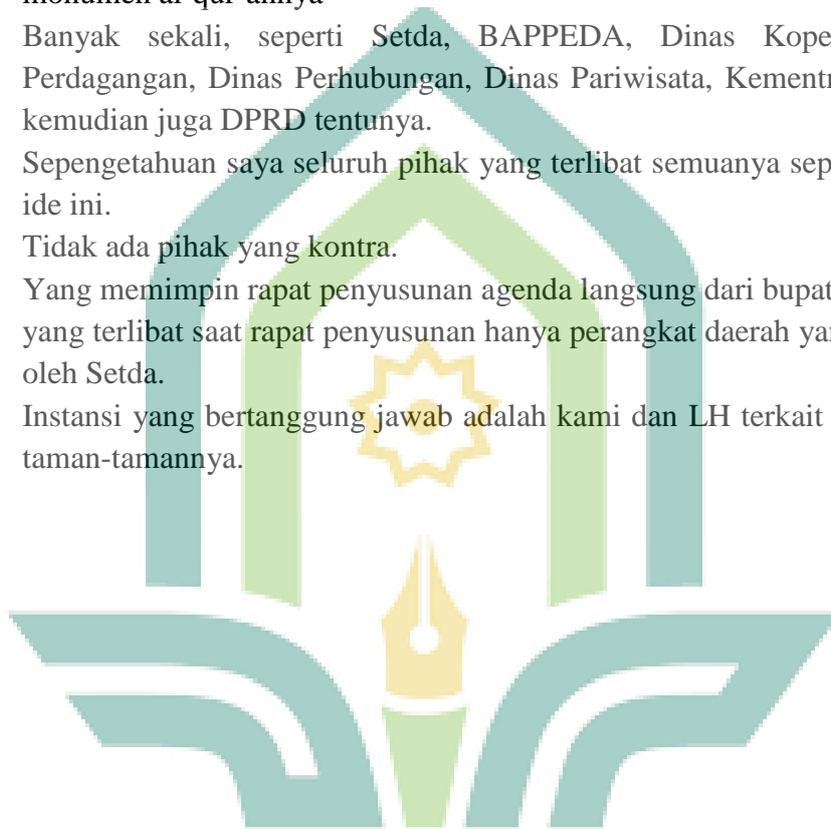
Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Agenda ini merupakan ide yang dibawa oleh lembaga eksekutif yang kemudian dipresentasikan ke pihak kami.
2. Awalnya, kami tidak sepakat dengan ide ini karena menurut kami masih banyak permasalahan yang harusnya diselesaikan dahulu oleh eksekutif seperti jalan yang rusak contohnya, namun seiring dengan semakin banyak waktu dan diskusi di ruang rapat, kami akhirnya menyetujui adanya agenda pembangunan ini dengan banyak pertimbangan.
3. Banyak pihak yang terlibat, seperti pihak Bupati, Setda, Bappeda, Dinas-dinas yang terkait dan sebagainya.
4. Seluruh eksekutif sepakat dengan pembangunan ini
5. Kami adalah satu-satunya aktor yang awalnya tidak sepakat atas ide tersebut.
6. Saat presentasi agenda, hal ini disampaikan langsung oleh sertda dengan bantuan dari BAPPEDA dan DPU TARU selaku lembaga yang paling berpengaruh atas agenda ini.
7. Tidak ada masyarakat yang terlibat, namun saat presentasi agenda, lembaga eksekutif mengatakan bahwa ini merupakan ide dan gagasan dari masyarakat.
8. Penanggung jawab dari agenda ini adalah DPU TARU dan LH.



Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

1. Ide ini berasal dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
2. Saya sepakat, karena Kabupaten Pekalongan sangat membutuhkan daya tarik wilayah agar daerah kita ini mudah dikenal dimasyarakat luas seperti halnya menyebut Semarang dengan kota tuanya, Purwokerto dengan menara menyalanya begitupun Kabupaten Pekalongan yang ingin dikenal dengan monumen Al-Qur'annya
3. Banyak sekali, seperti Setda, BAPPEDA, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kementerian Agama, kemudian juga DPRD tentunya.
4. Sepengetahuan saya seluruh pihak yang terlibat semuanya sepakat dengan ide ini.
5. Tidak ada pihak yang kontra.
6. Yang memimpin rapat penyusunan agenda langsung dari bupati.
7. Yang terlibat saat rapat penyusunan hanya perangkat daerah yang diundang oleh Setda.
8. Instansi yang bertanggung jawab adalah kami dan LH terkait pengelolaan taman-tamannya.



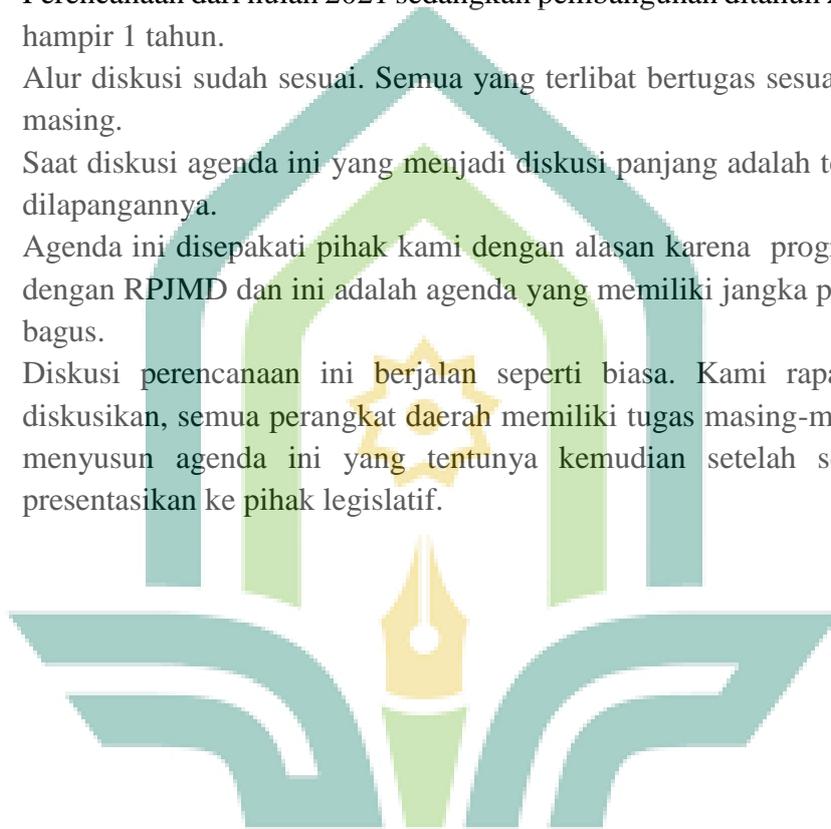
Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Rapat penyusunan agenda dimulai sejak tahun 2021.
2. Saya berperan untuk mengkoordinasikan perangkat daerah yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
3. Kami menyebar undangan rapat perdana pada bulan juli 2021.
4. Proses diskusi hampir berjalan selama satu tahun penuh.
5. Proses perumusan sudah sebagaimana mestinya dan seluruh herarki struktural pemerintahan di kabupaten pekalongan telah menjalankan tupoksinya masing-masing.
6. Hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah terkait daya tarik kabupaten pekalongan, value kabupaten yang dikaitkan dengan julukannya sebagai kota santri. Selain itu juga adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang akan hadir seiring dengan meningkatkan hubungan sosial disekitar alun-alun.
7. Jangka panjangnya adalah pertumbuhan perekonomian dan value kabupaten, kedua itu adalah alasan yang mendasar sehingga agenda ini dijalankan.
8. Agenda ini adalah kelanjutan dari RPJMD yang telah kami susun, dari sinilah agenda ini hadir atas ide bupati yang kemudian didiskusikan dengan perangkat daerah terkait serta kemudian dipresentasikan kepihak legislatif.



Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Perencanaan dilakukan dimulai pada tahun 2021, tepatnya bulan juli.
2. Selama rapat berlangsung, lembaga kami hanya berpedoman dengan Perda RT/RW serta RPJMD karena kedua hal itulah yang selalu menjadi patokan awal kami dalam mendiskusikan sebuah program atau kebijakan
3. Bulan juli 2021.
4. Perencanaan dari nulan 2021 sedangkan pembangunan ditahun 2022, berarti hampir 1 tahun.
5. Alur diskusi sudah sesuai. Semua yang terlibat bertugas sesuai bidangnya masing.
6. Saat diskusi agenda ini yang menjadi diskusi panjang adalah terkait teknis dilapangannya.
7. Agenda ini disepakati pihak kami dengan alasan karena program sejalan dengan RPJMD dan ini adalah agenda yang memiliki jangka panjang yang bagus.
8. Diskusi perencanaan ini berjalan seperti biasa. Kami rapatkan, kami diskusikan, semua perangkat daerah memiliki tugas masing-masing dalam menyusun agenda ini yang tentunya kemudian setelah selesai kami presentasikan ke pihak legislatif.



Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Proses diskusi yang dilakukan oleh ekspektif sejak bulan juli 2021.
2. Kami berperan untuk memberikan masukan atas semua agenda publik yang menggunakan dana APBD. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan APBD bisa dialokasikan dengan baik dan benar sesuai dengan skala prioritas permasalahan dimasyarakat.
3. Lembaga eksekutif datang ke kami sekitar bulan November tahun 2021.
4. Proses diskusi dengan kami hampir satu bulan lebih.
5. Proses diskusi dengan pihak kami agak sedikit *alot* karena menurut kami, pemkab belum waktunya untuk mempercantik alun-alun. Namun seiring berjalannya diskusi yang dilakukan dengan waktu yang panjang ini Pemkan menunjukkan keseriusannya dan bersedia untuk menerima masukan dari kami seperti dengan adanya pembangunan yang dibagi dengan 4 tahapan dengan menggunakan skala priortas.
6. Hal yang menjadi bahan pertimbangan sehingga agenda ini disepakati diantaranya adalah maksud dan tujuannya yang memang baik. Kemudian manfaat sosial yang sangat menjanjikan, serta hal ini dapat berdampak ke pertumbuhan perekonomian sekitar lokasi.
7. Seluruh bahan pertimbangan tadi adalah alasan mengapa kami menyepakati agenda ini.
8. Proses penyusunan sudah berjalan dengan baik. Seluruh elemen yang ada telah terlibat dan ini telah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

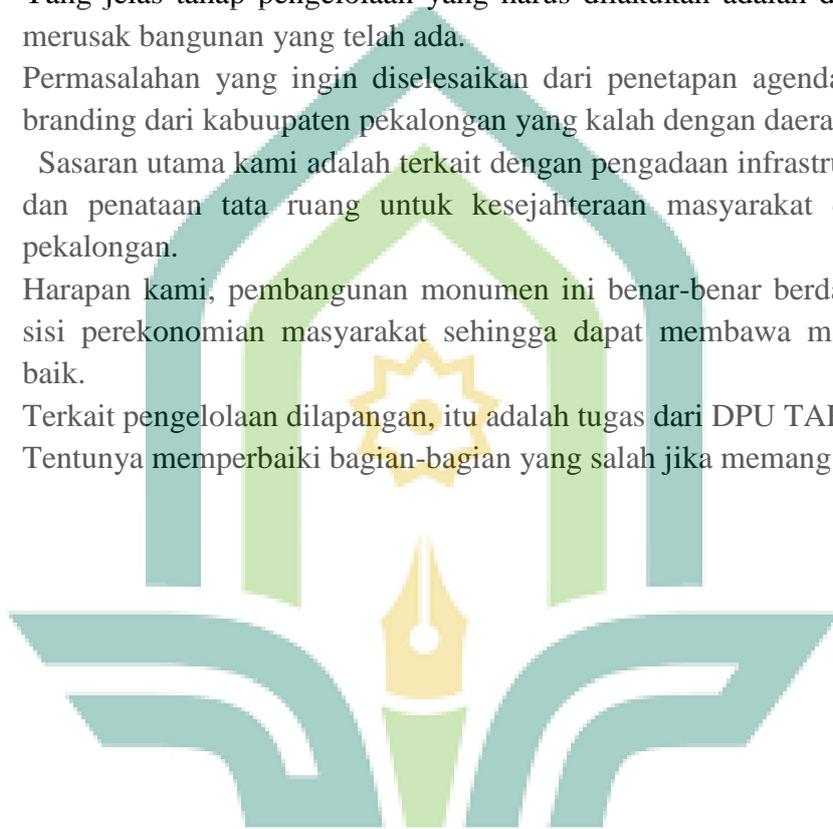
Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Gambaran Proses Perumusan Kebijakan

1. Bulan juli 2021.
2. DPU TARU bertugas sebagai tim teknisi sekaligus mengawal proses pekerjaan dan pembangunan.
3. Kami mulai mengikuti rapat ini semenjak bulan juli 2021.
4. Proses diskusi hampir berjalan satu tahun, mulai dari juli 2021 hingga pembangunan dilaksanakan pada juli 2022.
5. Proses diskusi berjalan cukup lama. Pada setiap bulannya kami hampir 2-3 kali selalu melakukan rapat penyusunan agenda ini.
6. Hal menjadi bahan pertimbangan adalah kabupaten pekalongan memang terlihat tidak memiliki daya tarik seperti dikota/kabupaten lain. Selain itu pe dari monumen al-qur'an pun sempat didiskusikan dengan sangat lama, karena hal tersebut ada kaitannya dengan kitab al-qur'an maka disini kami juga melibatkan dari kementrian agama.
7. Kabupaten pekalongan memang membutuhkan daya tarik dan icon daerah untuk meningkatkan branding di masyarakat luas dan hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Maka kedua hal ini adalah alasan mengapa pembangunan ini dilaksanakan.
8. Alur diskusi sudah sesuai dengan seharusnya. Kami seluruh perangkat daerah menjalankan tugas kami sesuai dengan kewenangannya masing-masing.



Jawaban Informan Wawancara Asisten 2 Bupati Pekalongan
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendek dari pembangunan ini adalah pembuatan icon kabupaten pekalongan.
2. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah alun-alun menjadi tempat berkumpul masyarakat yang dimana dari hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi masyarakat.
3. Yang jelas tahap pengelolaan yang harus dilakukan adalah dengan tidak merusak bangunan yang telah ada.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari penetapan agenda ini adalah branding dari kabupaten pekalongan yang kalah dengan daerah lain.
5. Sasaran utama kami adalah terkait dengan pengadaan infrastruktur publik dan penataan tata ruang untuk kesejahteraan masyarakat dikabupaten pekalongan.
6. Harapan kami, pembangunan monumen ini benar-benar berdampak pada sisi perekonomian masyarakat sehingga dapat membawa manfaat yang baik.
7. Terkait pengelolaan dilapangan, itu adalah tugas dari DPU TARU.
8. Tentunya memperbaiki bagian-bagian yang salah jika memang ada.



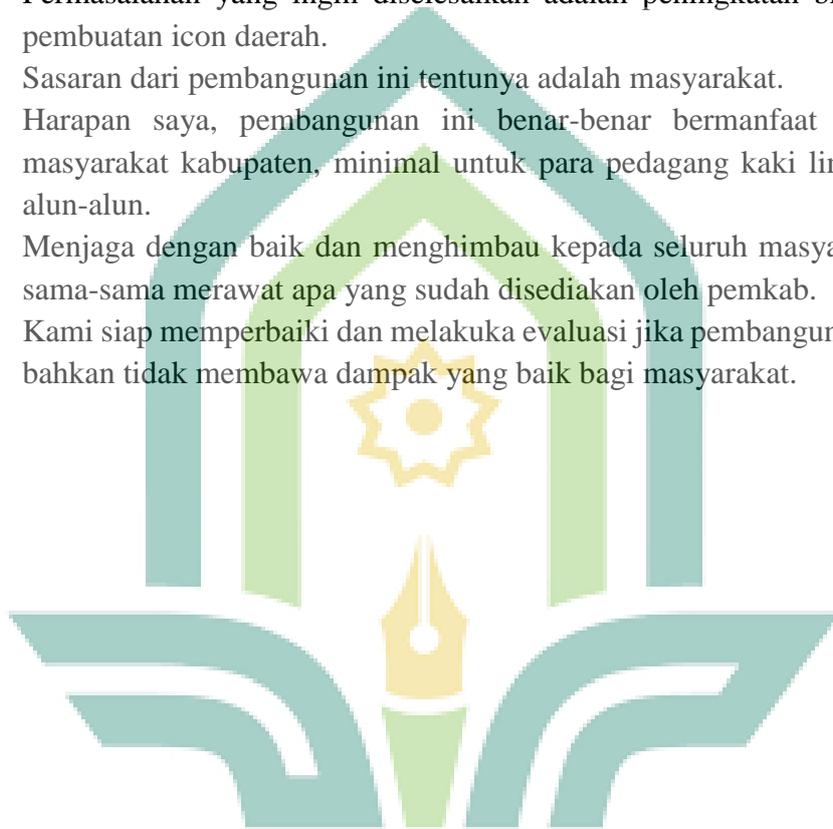
Jawaban Informan Wawancara BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan
Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan dari pembangunan ini adalah mempercantik alun-alun agar lebih indah.
2. Tujuan jangka panjangnya dengan alun-alun semakin bagus dapat menarik pengunjung yang nantinya berdampak pada sektor perekonomian.
3. Pengelolaan sepenuhnya menjadi tugas DPU TARU dan LH.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah tentang penataan kawasan tata ruang khususnya pengadaan infrastruktur publik di kabupaten pekalongan.
5. Sasaran utama dari agenda ini tentu adalah keharmonisan masyarakat. Kami ingin mesyarakat menjadi nyaman ketika berkunjung dan bermain di sekitar kawasan alun-alun.
6. Harapan kami bangunan ini dijaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.
7. Untuk pengelolaan tentunya DPU TARU akan menjaga dengan baik.
8. Ketika ada hal-hal yang rusak dan menimbulkan permasalahan, kami selaku pemerintah kabupaten siap untuk memperbaiki agar tujuan dari pembangunan ini bisa terwujud.



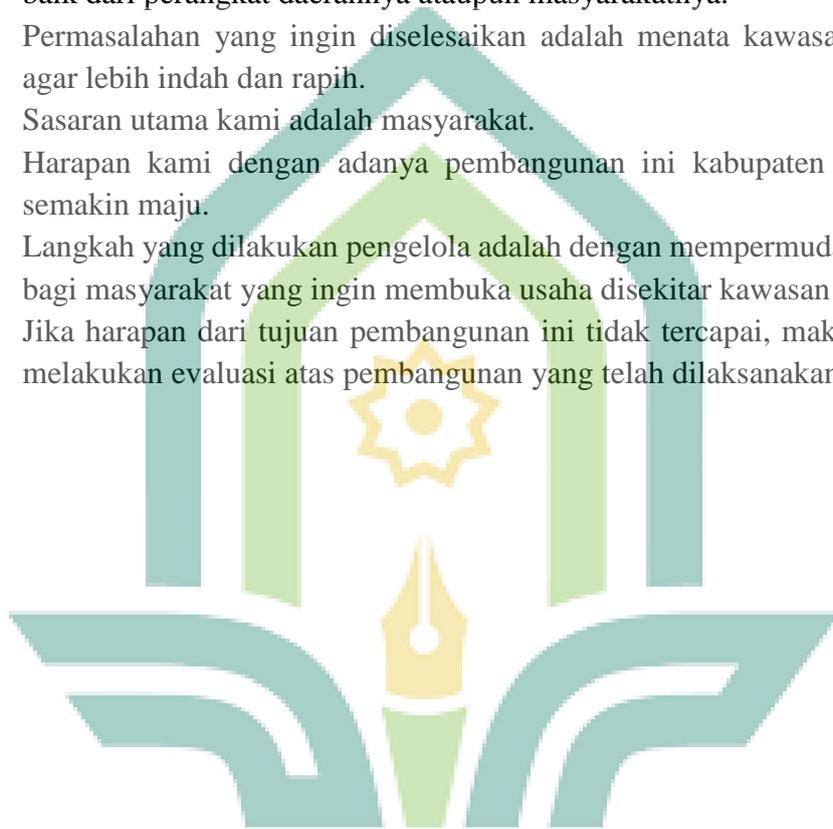
Jawaban Informan Wawancara Wakil DPRD Kabupaten Pekalongan
Terhadap Tujuan Proses Perumusan Kebijakan

1. Tujuan jangka pendeknya adalah menata kawasan alun-alun agar lebih indah.
2. Jangka panjangnya adalah dari hal tersebut, dapat menimbulkan daya tarik dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar.
3. Untuk pengelolaan itu tentunya tugas dari DPU TARU dan LH selaku pelaksana pembangunan.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah peningkatan branding dan pembuatan icon daerah.
5. Sasaran dari pembangunan ini tentunya adalah masyarakat.
6. Harapan saya, pembangunan ini benar-benar bermanfaat baik untuk masyarakat kabupaten, minimal untuk para pedagang kaki lima disekitar alun-alun.
7. Menjaga dengan baik dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama merawat apa yang sudah disediakan oleh pemkab.
8. Kami siap memperbaiki dan melakukan evaluasi jika pembangunan ini gagal bahkan tidak membawa dampak yang baik bagi masyarakat.



Jawaban Informan Wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan
Terhadap Tujuan Perumusan Kebijakan

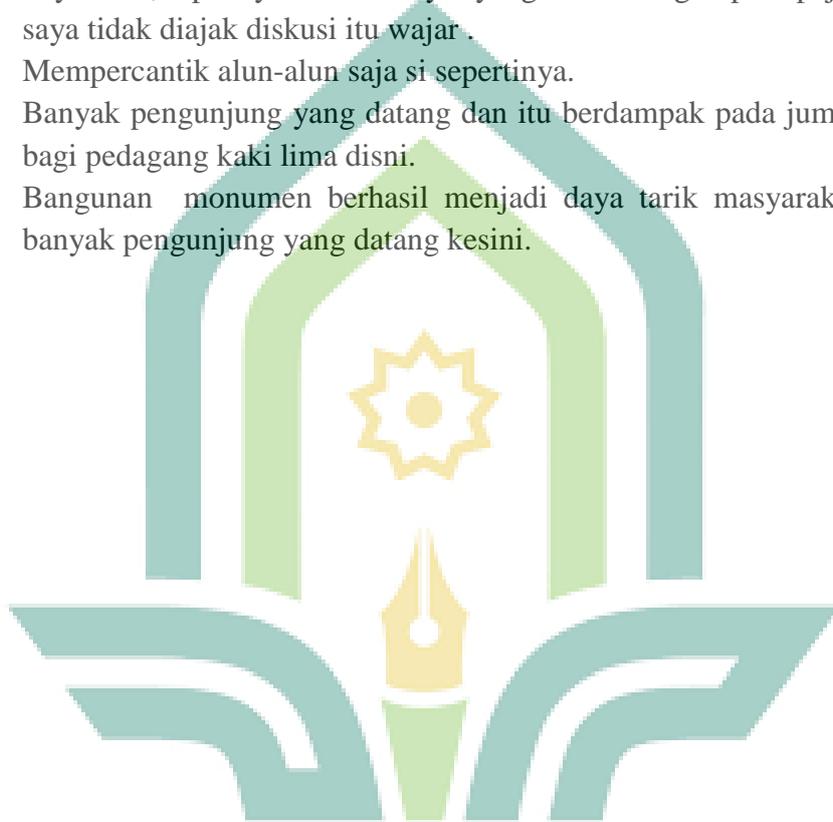
1. Tujuan jangka pendeknya adalah pembangunan icon kabupaten pekalongan sebagai kota santri.
2. Tujuan jangka panjangnya adalah peningkatan perekonomian masyarakat kabupaten pekalongan.
3. Pengelolaan ini harus dilaksanakan dengan kolaborasi dari seluruh elemen, baik dari perangkat daerahnya ataupun masyarakatnya.
4. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menata kawasan alun-alun agar lebih indah dan rapih.
5. Sasaran utama kami adalah masyarakat.
6. Harapan kami dengan adanya pembangunan ini kabupaten pekalongan semakin maju.
7. Langkah yang dilakukan pengelola adalah dengan mempermudah perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha disekitar kawasan alun-alun.
8. Jika harapan dari tujuan pembangunan ini tidak tercapai, maka kami siap melakukan evaluasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan.



Jawaban Informan Wawancara Ibu Rini (Pedagang Kaki Lima)

Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Saya sudah 7 tahun disini, tapi setahu saja, pedagang disini tidak ada yang diajak untuk diskusi.
2. Saya tidak pernah terlibat sama sekali dan saya kira itu adalah tugas mereka yang memiliki jabatan mba, misalpun saya diajak diskusi juga saya tidak akan paham soalbegituan.
3. Saya tidak tahu tentang begitu-begituan .
4. Saya tahu, tapi saya bukan rakyat yang dekat dengan para pejabat jadi ya saya tidak diajak diskusi itu wajar .
5. Mempercantik alun-alun saja si sepertinya.
6. Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumlah pembeli bagi pedagang kaki lima disini.
7. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak pengunjung yang datang kesini.



Jawaban Informan Wawancara Ibu Arum (Pedagang Kaki Lima)

Terhadap Aktor, Proses serta Tujuan Perumusan Kebijakan

1. Seingat saya lapangan disini mulai ditutup *pager* proyek itu dari bulan juli 2022, tapi saya ya hanya pedagang kecil yang idak pernah diajak diskusi.
2. Saya sudah berjualan disini hingga 20 tahun lebih, tapi saya tidak pernah diajak diskusi dan saya juga tidak tahu soal adanya rencana pembangunan monumen itu mba.
3. Saya tidak tahu secara menyeluruh
4. Saya tahu kalau rakyat adalah bagian dari orang yang harusnya terlibat.
5. Yang saya rasakan, manfaat dari bangunan ini untuk menarik perhatian masyarakat supaya mau berkunjung ke alun-alun.
6. Pembangunan ini berdampak sekali untuk para pedagang kaki lima disini. Kemarin saat proses pembangunan banyak pekerja proyek yang disini itu juga bagian dari tambahan jumlah pelanggan saya. Bahkan karena banyak para pengunjung yang datang, pendapatan kmai semakin bertambah. Bahkan jumlah pedagangpun semakin bertambah banyak, mereka berbondong-bondong datang untuk berjualan disini padahal mereka berasal dari wiradesa, bojong, kedungwuni yang jaraknya lumayan jauh dari alun-alun.
7. Ini program yang bagus, tinggal bagaimana terkait keberadaan para pedagang disini saja, mau dirapihkan atau memang dibiarkan berceceran seperti ini.
8. Mempersantik alun-alun saja si sepertinya.
9. Banyak pengunjung yang datang dan itu berdampak pada jumlah pembeli bagi pedagang kaki lima disini.
10. Bangunan monumen berhasil menjadi daya tarik masyarakat sehingga banyak ppengunjung yang datang kesini.

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Paksiwan KM. 5 Rowotaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.iainungtutur.ac.id email: febi@iainungtutur.ac.id

Nomor : B-221/Un.27/J.IV.1/TL.00/02/2024 12 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepada Bapak/Ibu
BAPPEDA LITBANG Kabupaten Pekalongan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Zakirotul Khasanah
NIM : 4120040
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpinan guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Balai Sertifikasi Elektronik

Didandatangani Secara Elektronik Oleh:

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 197502201999032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



02 FEBRUARI 2024
08:04:29

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Krakatau No. 9 Kajen
Telepon (0285) 381456, 381010, Faks. (0285) 381789
Website : <http://baperida.pekalongkab.go.id> Email : baperida@pekalongkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000 9 2 / 75 / V / 2024

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-221/Un.27/J.IV.1/TL.0002/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Izin Penelitian, kami yang bertandatangan dibawah ini dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Zakirotul Khasanah
2. NIM : 4120040
3. Program Studi : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Judul Penelitian : Analisis Peran Aktor Dalam Perumusan Pembangunan Monumen Al-Qur'an Kabupaten Pekalongan

telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun laporan Proyek Akhir/Skripsi mahasiswa S1 Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada tanggal 12 Februari s.d 25 April 2024.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 06 Mei 2024

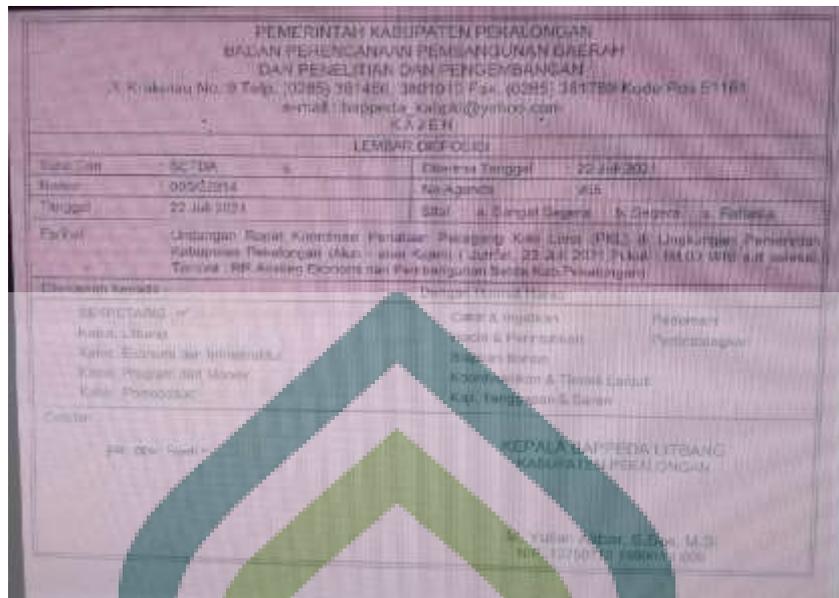
s.d. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PEKALONGAN
Bidang Riset dan Inovasi Daerah


Heri Nugroho, S.STP, M.M.
Penata
NIP 199309082015071001



Tembusan :
1. Sdr. ZAKIROTUL KHASANAH, tersebut.

Dokumentasi



912	21 Juli 2021	996 / 126	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) I (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021)	Region 1 SETDA SETDA
24	20 Juli 2021	501 / 02796	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) II (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021) (Mks - awal Kaban) (Jurnal: 22 Juli 2021) (Jumlah: 04/03) (Wf: 01) (sifat: Terbatas) (RP: Asisten Eksekutif dan Pw: bantuan) (Sifat: Kab. Peralongan)	Region 1 SETDA SETDA
408	28 Juli 2021	700 / 50395	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) III (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021) (Mks - awal Kaban) (Jurnal: 22 Juli 2021) (Jumlah: 04/03) (Wf: 01) (sifat: Terbatas) (RP: Asisten Eksekutif dan Pw: bantuan) (Sifat: Kab. Peralongan)	Region 1 SETDA SETDA
914	27 Juli 2021	005/2021/10/10/2021	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) IV (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021) (Mks - awal Kaban) (Jurnal: 22 Juli 2021) (Jumlah: 04/03) (Wf: 01) (sifat: Terbatas) (RP: Asisten Eksekutif dan Pw: bantuan) (Sifat: Kab. Peralongan)	Region 1 SETDA SETDA
915	27 Juli 2021	005/2021/10/10/2021	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) V (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021) (Mks - awal Kaban) (Jurnal: 22 Juli 2021) (Jumlah: 04/03) (Wf: 01) (sifat: Terbatas) (RP: Asisten Eksekutif dan Pw: bantuan) (Sifat: Kab. Peralongan)	Region 1 SETDA SETDA
916	27 Juli 2021	005/2021/10/10/2021	Undangan Rapat Koordinasi Panitia Pengembang Kota Baru (PKB) VI (awal / awal) (Terakhir: 19/08/2021) (Mks - awal Kaban) (Jurnal: 22 Juli 2021) (Jumlah: 04/03) (Wf: 01) (sifat: Terbatas) (RP: Asisten Eksekutif dan Pw: bantuan) (Sifat: Kab. Peralongan)	Region 1 SETDA SETDA

















DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Zakirotul Khasanah
2. Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 20 Februari 2001
3. Alamat rumah : Jl. Innova III Desa Wiradesa
4. Alamat tinggal : Dk. Sigandek, Rt 23/Rw 05, Ds. Wiradesa, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan
5. Nomor Handphone : 085740804831
6. E-mail : zakirotul20@gmail.com
7. Nama ayah : Cufrihardi
8. Nama ibu : Roliyah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Kadipaten (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 2 Wiradesa (2014-2017)
3. SMK : SMK Negeri 1 Sragi (2017-20220)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Ekonomi Syariah, Koordinator Departemen Sumber Daya Insani (2021-2022)
2. DEMA FEBI, Koordinator Departemen Dalam Negeri (2022-2023)
3. PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam, Koordinator Kaderisasi (2022-2023)
4. PMII PK Ki Ageng Ganjur, Koordinator Kaderisasi (2023-2024)

Pekalongan, 7 Mei 2024

Zakirotul Khasanah